BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Kualitas Pendidikan di Provinsi Papua

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan.

Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekelilingpembangunan.Untuk mengukur kualitas manusia dapat dilihat dari capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM terdiri dari 3 komponen yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas Hidup Layak.

Pendidikan adalah salah satu investasi pengembangan terbaik. Pendidikan merupakan hal penting untuk pencapaian semua *Millenium Development Goals* (MDGs) dan hasil pembangunan lainnya. Pendidikan memungkinkan orang untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, meningkatkan akses ke pekerjaan dan sumber pendapatan lain dan membuka peluang.

Pendidikan juga memberikan manfaat dalam kesehatan, pemerintahan, produktivitas, kesetaraan gender dan pembangunan bangsa.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari tujuan dari pemerintah terutama dalam menentukan kebijakan politik di bidang pendidikan. Kebijakan yang di ambil kadang membawa dampak yang signifikan dan terkadang membawa kesan bahwa kebijakan itu tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Berkaitan dengan itu, ada beberapa kebijakan pendidikan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, hasil pemetaan pendidikan khususnya tenaga pendidik dan kependidikan di kabupaten Yahukimo, Jayawijaya dan Nabire.

A. Penempatan Dan Distribusi
    1. Penumpukan Tenaga pendidik di Kota,Pedesaan,terpencil berkurang
    2. Penumpukan Tenaga pendidik di Kota juga disebabkan banyaknya mutasi tenaga pendidik perempuan (nota dinas) ke kota karena mengikuti suami, dan masalah sosial (tempat yang terpencil)
    3. Proporsi Tenaga pendidik di pedesaan dan terpencil usia 20 – 29 kurang dibandingkan yang berkerja di perkotaan
    4. Penempatan di pedesaan dan terpencil formulasi *real teaching* bergantian dengan pendekatan pembelajaran multi kelas
B. Mutasi Fungsional Dan Struktural
    1. Mutasi ke pedesaan dan terpencil telah dilakukan sesuai kebutuhan. Tetapi kenyataannnya tenaga pendidik tidak betah di pedesaan dan terpencil

2. Banyaknya tenaga pendidik potensial direkrut dalam jabatan struktural (Diangkat menjadi Camat,Anggota Legislatif,dll)

C. Promosi Kepangkatan Tenaga pendidik
   1. Pengurusan promosi jabatan/pangkat bagi tenaga pendidik di daerah terpencil sangat sulit

D. Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi
   1. Masih terdapat sejumlah tenaga pendidik di kawasan terpencil yang berkualifikasi SMP,SMA,SMK
   2. Masih terbatasnya kemampuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua dalam memperluas jangkauan pelayanannya ke Kabupaten

E. Penilaian Dan Pengawasan Kinerja
   1. Kinerja kompetensi tenaga pendidik masih jauh di bawah standar,isi dan proses
   2. Jumlah pengawas tidak memadai, Tugas pokok dan fungsi tidak berjalan secara optimal
   3. Hasil pengawasan kinerja belum digunakan sebagai dasar DP3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan)

F. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
   1. Tiap hari rata-rata 50-60 tenaga pendidik mengurus administrasi pendidikan di kantor cabang di Distrik/Kecamatan belum difungsikan
   2. Belum tersedia Sistem Informasi Tenaga pendidik (SIG)

3. Kurangnya komunikasi/ketidakterbukaan, kepercayaan tenaga pendidik semakin menurun

G. Kesejahteraan Tenaga pendidik

1. Tenaga pendidik mendapat lagi insentif dari Pemda sebesar Rp.300.000,-/persemester
2. Tunjangan Daerah Terpencil (TDT) dari Pemerintah Pusat sangat membantu tenaga pendidik, dan perlu mencari mekanisme penyaluran insentif yang efektif yang mendorong tenaga pendidik "betah" bekerja di desa terpencil
3. Rumah dinas tenaga pendidik (rumah inpres) dari Pemerintah Pusat sangat membantu tenaga pendidik. Sudah sebagian besar rumah dinas tenaga pendidik tidak berfungsi atau rusak total
4. Pengambilan gaji bagi tenaga pendidik PNS yang diperbantukan di yayasan di bayar langsung di tempat tugas, sedangkan tenaga pendidik di sekolah negeri masih dilakukan di ibu kota kabupaten (http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61).

Menurut provinsi di Indonesia, pada tahun 2007 peringkat IPM teratas ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan besaran IPM mencapai 76.6. Sedangkan peringkat IPM terendah berada di Provinsi Papua dengan capaian IPM sebesar 63.4. Menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa),maka Provinsi Papua masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia menengah bawah yaitu kelompok daerah dengan capaian IPM diantara 50.00-65.9 (http://www.kab.go.id/wp-

content/uploads/2009/11/IPM-Kab-.pdf).

Data tersebut menunjukkan kurangnya tingkat pendidikan di Indonesia serta diperlukannya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). Karena tingkat kemiskinan di Indonesia terpusat di golongan masyarakat bawah serta pendidikan formal yang minim. Maka, pemerintah berkerja sama dengan berbagai kalangan dan telah berupaya mewujudkan harapan tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih bermutu antara lain melalui memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengajar, pengembangan atau perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi pengembangan dan pengadaan materi, serta, perbaikan sarana pendidikan,.

Tetapi upaya pemerintah tersebut belum berdampak signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan permasalahan khusus dalam pendidikan di Indonesia khususnya di Provinsi Papua yaitu rendahnya kualitas pengajar, rendahnya kesejahteraan pengajar, rendahnya sarana fisik, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan (http://kabar-pendidikan.com/2011/04/faktor-faktor-rendahnya-mutu-pendidikan.html).

Albert Einstein pernah berkata bahwa, "*Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school*. Begitu pentingnya pendidikan sehingga seorang Einstein pun sampai berkomentar tentang pentingnya pendidikan. Tanpa pendidikan, taraf hidup serta standar kualitas seorang manusia bisa dikatakan akan berdampak buruk. Seseorang yang memperoleh pendidikan

yang semakin tinggi tentunya akan mempunyai kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang hanya tamat sekolah dasar.

Setiap negara diseluruh dunia begitu menekankan pentingnya kualitas pendidikan. Salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menetapkan anggaran pendidikan yang lebih besar dibandingkan anggaran lainnya. China dan Korea Selatan menjadi dua negara yang begitu menekankan pentingnya pendidikan bagi rakyatnya. Anggaran pendidikan di China mencapai 13,1% dari anggaran negara, sedangkan di Korea Selatan anggaran pendidikan negara mencapai 18,9%. Bahkan Indonesia menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, bukti bahwa Pemerintah menaruh keseriusan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Walaupun begitu, pemerintah harus bisa membuat prioritas dalam upaya perbaikan kualitas manusia Indonesia. Realisasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN negara harus bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Jangan sampai anggaran yang telah besar ini justru dikorup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penetapan sistem pendidikan yang baku serta tidak harus berubah pada setiap pergantian menteri harus bisa menjadi target pemerintah. Hal ini bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Daerah-daerah seperti ini seharusnya menjadi fokus pemerintah karena banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Hal ini dibuktikan

dengan adanya sekolah rintisan bertaraf internasional yang berada di Papua. Sekolah yang berlokasi di puncak Tanah Papua tersebut telah banyak menghasilkan siswa-siswi berprestasi baik tingkat nasional maupun tinggkat Internasional seperti Septianus George Saa peraih *first nobel* IPho Dunia 2002-2005 dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di *Florida Institute of Technology* Amerika Serikat. Novela Kristin Auparay mewakili Papua pada Ol*ympiade Sains Nasional* (OSN) Fisika tingkat Nasional dan masih banyak lagi putera-puteri terbaik Papua yang membanggakan dan meraih prestasi dalam bidang pendidikan tingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan kualitas para pendidik pun harus bisa diperhatikan oleh pemerintah. Hingga saat ini untuk mencapai sekolah bertaraf standar internasional telah dipersipkan tenaga pengajar dengan gelar S-2 dan juga S-3, sehingga para tenaga pendidik yang mengajari dan membimbing para calon pemimpin bangsa ini merupakan orang-orang yang memang mempunyai kualitas dan standar yang tinggi. Inilah beberapa hal yang telah dan terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM diseluruh Indonesia (http:// provinsipapuainfo.com/2011/05/02/peningkatan-kualitas-pendidikan-di-indonesia/).

Pada saat yang sama, pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih

sangat terbatas. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual.

Upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi juga telah dilakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis terungkap bahwa mutu lulusan perguruan tinggi masih rendah sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan masa tunggu bekerja (*job seeking period*) yang masih cukup lama. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja berpengaruh pada masih rendahnya penyerapan lulusan perguruan tinggi. Praktik-praktik rekruitmen tenaga kerja yang memprioritaskan tenaga kerja berpengalaman menyebabkan lulusan baru (*fresh graduates*) memiliki peluang yang lebih rendah dalam memperoleh pekerjaan.

Di samping itu, sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan secara tepat, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, belum mampunya Indonesia meningkatkan daya saing institusi pendidikan dalam menghadapi era global pendidikan, belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, penguatan manajemen pendidikan dilakukan melalui otonomi perguruan tinggi (PT). Perguruan tinggi diberi tanggung jawab yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas publik. Otonomi perguruan tinggi sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Sampai dengan awal tahun 2005 telah ditetapkan 6 PTN yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN), yaitu ITB, UI, IPB, UGM, UPI, dan USU. Dalam masa transisi PT-BHMN memperoleh mandat untuk beroperasi sebagai badan layanan umum menuju badan hukum pendidikan. Namun, pelaksanaan PT-BHMN belum berjalan dengan baik, antara lain karena belum tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lain yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan harus diupayakan untuk ditingkatkan mencapai minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun, mengingat keadaan keuangan negara, pemenuhan amanat tersebut belum dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan (http://komunikasi.um.ac.id/?p=503).

4.1.1 Peningkatan Mutu Pendidikan

Setelah 60 tahun negara kita merdeka Pemerintah untuk pertamakalinya berhasil menyusun standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut merupakan acuan dasar sekaligus rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Dengan acuan tersebut diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tidak lagi ditemukan pelayanan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional. Dengan demikian, upaya untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat menjadi lebih jelas.

Sejalan dengan PP tersebut Pemerintah telah pula membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas untuk membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BSNP mempunyai kewenangan untuk :

1. Mengembangkan standar nasional pendidikan;
2. Menyelenggarakan ujian nasional;
3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; serta

4. Merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan telah dilakukan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2004/2005 sesuai dengan jadwal, yaitu: SMA/MA dan SMK pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2005 dan SMP/MTS, SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada tanggal 6 – 8 Juni 2005. Pengumuman hasil UN telah dilakukan secara serentak pada tanggal 30 Juni 2005 dengan penetapan batas nilai kelulusan 4,25. Kenaikan batas nilai kelulusan dari 4,01 merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Pembangunan pendidikan dibedakan dalam dua kerangka arah kebijakan, yaitu kerangka anggaran dan kerangka regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development.* Meningkatkan Relevansi Pendidikan dengan keperluan Pembangunan agar lebih sesuai dengan keperluan pembangunan daerah dan pembangunan nasional secara umum.

1) Menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja.

2) Meningkatkan intensitas pendidikan nonformal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pelayanan pendidikan formal.

3) Meningkatkan intensitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat untuk oleh perguruan tinggi terutama untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti dengan upaya penerapannya pada masyarakat (dokumen RENSTRA KemDikNas 2005 – 2009).

Pendidikan di Papua diatur dalam peraturan otonomi khusus. Pemerintah Papua menyediakan 30 persen dana APBD untuk pendidikan, meskipun implementasinya belum mencapai ke sana. Namun pemerintah berusaha untuk menuju ke arah tersebut.

Sebanyak 80 milyar disalurkan untuk dana bantuan pembebasan biaya pendidikan. Sebanyak 60 milyar dipakai untuk beasiswa S1 dan S2. Hanya sebagian kecil dari dana pendidikan dipakai untuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan perbaikan fisik sekolah. Perbaikan dan pembangunan daerah dilakukan oleh daerah, bukan propinsi dikarenakan dengan peraturan otonomi daerah khusus.

Kondisi geografis dan karakteristik serta kekayaan alam Papua membuat pembangunan Sumbar Daya Manusianya (SDM) penting untuk dilakukan. Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota memiliki masalah yang kompleks, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam tata kelola pendidikan itu sendiri.

Masalah tersebut adalah potensi yang patut digali. Sektor tersebut memegang peranan penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya alam.

Fokus pembangunan pendidikan di Papua adalah melakukan percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Pemerintah juga akan melakukan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun serta percepatan peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pemerintah juga akan mempercepat peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik.

Menurut data yang diperoleh, dari 23 ribu tenaga pendidik di Papua baru 4.000 tenaga pendidik yang bersertifikasi. Kebanyakan dari mereka belum bersertifikasi karena tidak lulus sarjana. Tenaga pendidik di Papua yang telah sarjana baru sekitar 8 ribu orang, sedangkan 15 ribu tenaga pendidik belum sarjana. Karena belum bersertifikasi, tenaga pendidik tersebut tidak mendapat tunjangan profesi (http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/04/06/lj8hm9-infrastruktur-hambat-peningkatan-pendidikan-di-papua).

4.2 Program - program *Australian Agency for International Development* (AusAID) sebagai solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua

Bantuan Australia melalui AusAID dalam bidang pendidikan beragam, dari pendidikan dasar hingga pelatihan ketrampilan kejuruan dan meningkatkan kualifikasi tingkat perguruan tinggi.

A. Pembangunan sekolah-sekolah

Australia telah membangun lebih dari 2,000 sekolah tingkat menengah pertama di berbagai daerah di Indonesia guna membantu meningkatkan akses pendidikan. Lebih dari 130,000 anak kini telah terdaftar dan belajar di sekolah-sekolah tersebut; 50 persen anak-anak ini adalah perempuan. Karena banyak sekolah yang dibangun di daerah terpencil dan miskin, sekitar 70 persen siswa kini dapat berjalan kurang dari tiga kilometer untuk ke sekolah. Tingkat ketidakhadiran dan putus sekolah di sekolah-sekolah ini juga lebih rendah dibanding tingkat rata-rata nasional.

B. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Australia membantu Indonesia meningkatkan sistem pendidikan. Ini termasuk mengembangkan ketrampilan tenaga pendidik dalam mengajar dan kemampuan orang tua untuk membantu pendidikan anak-anak mereka. Australia juga bekerjasama dengan kepala sekolah untuk mengembangkan ketrampilan manajemen mereka beserta pejabat pendidikan disekitar 34 provinsi untuk lebih baik mengelola dana pendidikan mereka.

C. Peningkatan Madrasah

Australia juga turut mengembangkan kualitas pendidikan sekolah madrasah di Indonesia. Sekolah berbasis agama merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Diperkirakan 13 persen dari pelajar di Indonesia bersekolah di madrasah. Sekolah-sekolah

ini umumnya terletak di daerah miskin dan terpencil. Australia membantu sekolah-sekolah madrasah yang menerapkan kurikulum nasional. Kami membantu melatih tenaga pendidik di sekolah-sekolah ini termasuk mengembangkan keterampilan mereka dalam Bahasa Inggris.

D. Peningkatan Kesetaraan Gender

Bantuan Australia untuk sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk secara adil memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam hal memberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah; menciptakan lingkungan sekolah yang ramah; dan memastikan bahan-bahan pelajaran yang peka jender. Sekolah-sekolah yang dibangun dengan bantuan Australia juga memiliki fasilitas kamar kecil yang terpisah untuk anak laki laki dan perempuan, agar anak perempuan merasa nyaman bersekolah. Australia juga mendukung agar ada perwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan seperti pengajaran, administrasi dan pengelolaan pendidikan.

E. Kemitraaan dan Kegiatan Bantuan

Program-program pendidikan Australia yang terakhir di Aceh, Papua dan Sumatera Barat memiliki perjanjian pembiayaan bersama dengan mitra-mitra kunci pendidikan termasuk Uni Eropa, Kerajaan Belanda, USAID, Bank Dunia dan UNICEF. Belakangan ini, Australia juga memimpin Kelompok Kerja Sektor Pendidikan, sebuah forum yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, yang berfokus pada kebijakan pendidikan.

F. Pemberian Beasiswa

Australia setiap tahunnya memberikan lebih dari 300 beasiswa untuk warga Indonesia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Australia. Ini membantu pembangunan sumber daya Indonesia dan memperkuat hubungan persaudaraan antara kedua negara. Melalui *The Australia Awards*, beasiswa diberikan pada daerah yang berkembang yang telah disepakati oleh Australia dan Indonesia dan mencakup bidang studi kesehatan, pendidikan, reformasi demokrasi, tata kelola yang baik, penanggulangan dan tanggap bencana dan pengelolaan sektor umum. Diperkirakan 17 persen dari alumni kini menduduki posisi yang berpengaruh, termasuk Wakil Presiden Indonesia,Menteri Luar Negeri dan Penasihat Kebijakan Dalam Negeri Presiden. Sekitar 94 persen alumni percaya bahwa keahlian yang mereka dapatkan di Australia turut membantu pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/sectors/educationandscholarships-indo.html).

Demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Australia melalui *The Australian Awards* menawarkan berbagai bentuk beasiswa diantaranya :

1. *Australian Development Scholarships* (ADS)
   - Nilai bantuan: A$ 40 juta
   - Tujuan : membangun sumber daya manusia Indonesia dan hubungan dengan Australia.

Setiap tahun, Australia menganugerahkan 300 beasiswa pasca sarjana bagi warga Indonesia untuk mempelajari bidang-bidang yang penting untuk ekonomi, pengembangan sosial dan masyarakat Indonesia. Jumlah beasiswa yang diberikan kepada laki laki dan perempuan untuk belajar ditingkat *Master* atau Doktor (S2 dan S3) pada universitas-universitas di Australia adalah setara. Hingga 30 persen dari beasiswa tersebut diberikan kepada mereka yang berasal dari provinsi terbelakang di Indonesia, dimana akses atas pendidikan berkualitas tinggi sangat terbatas.

2. Australian Leadership Awards

- Nilai Bantuan: 150 beasiswa pertahun di seluruh Asia Pasifik
- Tujuan : Membangun kepemimpinan di area-area prioritas pembangunan dan menjalin kemitraaan di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Program ini terdiri dari pemberian beasiswa dan *fellowship. Fellowship*, merupakan program belajar, riset dan professional jangka pendek di Australia yang diberikan oleh organisasi-organisasi Australia. Beasiswa adalah bantuan belajar ditingkat *Master* dan Doktor (S2, S3) di universitas-universitas Australia. Bidang pelajaran meliputi: disabilitas, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, jender, tata kelola, kesehatan, hak asasi manusia, infrastruktur, stabilitas kawasan, pembangunan daerah pedesaan, serta air dan sanitasi. Indonesia selama ini menjadi penerima beasiswa dan *fellowship* terbesar dibandingkan negara-negara mitra Australia lainnya dalam program ini.

3. Beasiswa Kemitraan Australia
    - Nilai Bantuan: A$ 66 juta
    - Tujuan: memperkuat sumber daya manusia Indonesia dalam bidang ekonomi, tata kelola dan sektor publik .

Australia telah memberikan bantuan berupa 600 beasiswa pasca sarjana di bidang tata kelola ekonomi, manajemen sektor publik dan pendidikan untuk mendapatkan gelar S2 di universitas-universitas Australia. Program ini bertujuan untuk memperkuat rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang Indonesia dengan cara membangun sumber daya manusia di bidang-bidang penting ini. Semua 600 penerima beasiswa ini menyelesaikan studi mereka pada Juni 2010 (http://www.ausaid.gov.au/scholar/default.cfm).

4.2.1 Peranan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia

Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia dibuka tahun 1949, dan Indonesia membuka hubungan diplomatik penuh pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai Kuasa Usaha ad Interim yang untuk sementara menempati Gedung Arsip Nasional di Canberra. Dr. Oesman kemudian kembali ke Indonesia tanggal 5 Juli 1950 dan digantikan oleh Oetojo Ramelan sebagai Duta Besar Penuh. Kantor Perwakilan RI di Canberra pada saat itu berpindah-pindah, dan baru pada bulan Agustus 1971 menempati Kantor Permanen yang ada saat ini di daerah Yarralumla, yang merupakan daerah lingkungan perwakilan-perwakilan asing di Canberra.

Dasar-dasar hubungan Indonesia – Australia relatif kokoh. Hal ini mengingat komitmen pemimpin kedua negara untuk mengembangkan *good-neighborliness,* adanya peluang untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta terdapatnya instrumen legal/normatif antara lain *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (2005) serta *Lombok Treaty* (2006) (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=56&P=Bilateral&l=id).

Pemerintah Australia secara finansial mendukung pihak-pihak yang terseleksi untuk mendapatkan beasiswa sebagai perwakilan dari negara untuk belajar di Australia secara berkala (setiap tahun). Dimulai dengan beasiswa yang dibiayai melalui *Colombo Plan* yang merupakan program beasiswa yang ditawarkan pertama kali oleh pemerintah Australia kepada kawasan Asia-Pasifik termasuk kawasan Asia Tenggara (Indonesia). Selama periode diselenggarakan, program tersebut berkembang dengan kebutuhan pendidikan Indonesia.

Pemerintah Australia memberikan Program *Australian Development Scholarships* (ADS) bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Salah satu Provinsi yang mendapat bantuan dari pemerintah Australia melalui program ADS ini, adalah Provinsi Papua. Melalui penyediaan beasiswa pascasarjana untuk belajar di Australia.

Kemitraan Australia-Indonesia mencerminkan kepentingan Nasional Australia dalam mendukung stabilitas kemakmuran di Indonesia dalam membrantas kemiskinan. Indonesia penerima dana bantuan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Karena Australia memiliki komitmen kemitraan yang kontinyu

dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pembangunan sejak peristiwa tsunami di Samudera Hindia (Nanggroe Aceh Darussalam) tahun 2004 (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html).

Australia lebih mengutamakan penguatan ekonomi dan manajemen keuangan, membangun lembaga demokratis, mempromosikan stabilitas dan keamanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa di Indonesia, khususnya provinsi-provinsi termiskin di wilayah Kawasan Timur Indonesia (http://suripto3x. com//pembagian-peran-pemerintah-provinsi-dan-kabupatenkota-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan-sebagai-kunci-membangun-kualitas-sumber-daya-manusia-daerah-perbatasan/).

Australia terus mendukung demokrasi di Indonesia melalui program diperluas bantuan untuk reformasi hukum dan hak asasi manusia. Program ini berfokus pada reformasi peradilan, promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas publik, proses pemilihan dan parlemen dan lembaga. Hal ini juga menyediakan dukungan untuk organisasi masyarakat hukum dan anti-korupsi.

Program pembangunan Australia terus mendukung langkah-langkah untuk reformasi ekonomi di Indonesia. Ini termasuk restrukturisasi sektor keuangan dan pengawasan, manajemen utang, peningkatan pendapatan dan peningkatan kapasitas audit. Program membangun dukungan yang ada untuk pusat manajemen obligasi pemerintah, lebih lanjut membantu kantor pajak Indonesia untuk merampingkan dan meningkatkan proses dan membantu dengan restrukturisasi utama dari Departemen Keuangan Indonesia. Pendekatan terpadu

untuk pengurangan kemiskinan di Indonesia juga diadopsi, dengan ini termasuk membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan pendekatan baru untuk pengurangan kemiskinan dan tata pemerintahan yang lebih baik tingkat kabupaten (http://www.ausaid.gov.au/country/country.cfm?CountryId=30).

Pendidikan di daerah perbatasan pada umumnya masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata pendidikan masyarakat daerah perbatasan hanya 6 tahun. Bila kita bandingkan dengan pencanangan wajar 9 tahun, maka masyarakat perbatasan masih dibawah dari standar nasional. Tentunya hal ini harus menjadi *concern* semua pihak dalam membangun pendidikan di daerah perbatasan.

Berdasarkan UU 32 tahun 2004, urusan pendidikan merupakan salah satu bidang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun, tidak dengan demikian pemerintah pusat tidak memiliki kewajiban dalam membangun pendidikan di daerah perbatasan.

Pemerintah pusat tetap memiliki kewajiban terhadap pembangunan bidang pendidikan di daerah perbatasan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan diatas, telah diatur dengan PP 38 tahun 2007 tentang pembangian urusan pemerintahan. Dengan melihat karakteristik dan permasalahan pendidikan di daerah perbatasan, apakah peran pemerintah hanya sebatas yang diatur dalam PP 38 tahun 2007.

Australia dan Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dalam hal kerjasama pendidikan. Pada beberapa tahun terakhir ini, hubungan kerjasama di bidang pendidikan telah mendapat dukungan dari berbagai kalangan pejabat pemerintahan. Pada bulan November 2008, Menteri Pendidikan Australia (Ms.

Julia Gillard) dan Indonesia (Bpk. Bambang Sudibyo) telah menandatangani MoU yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memperkuat hubungan kerjasama pendidikan antar ke dua negara. Penandatangan MoU tersebut di lakukan di gedung Parliament, Canberra, pada saat acara pertemuan Australia-Indonesia *Ministerial Forum* (AIMF) ke 9 (http://atdiknas-canberra.org/review-kerjasama-bidang-pendidikan-antara-indonesia-australia.html).

Penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah perbatasan khususnya melibatkan tiga pemerintahan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan oleh ketiga tingkatan tersebut tentunya membuka potensi terjadinnya tumpang tindih dan duplikasi atau bahkan terbaikan kewenangan atau tanggung jawab. Oleh karena itu, mensinergikan ketiga tingkatan pemerintahan tersebut menjadi sangat penting dalam pembangunan kawasan perbatasan khususnya pendidikan, mengingat kawasan perbatasan antarnegara merupakan beranda depan negara (http://www.australiaawardsindo.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=138&lang=en).

4.2.1.1 Pemerintah Pusat

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyerahkan pengelolaan lembaga pendidikan di wilayah perbatasan kepada kabupaten setempat. “Kami di pusat hanya membantu saja”. Selanjuntya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Dengan Pasal 3 tersebut

artinya, pemerintah pusat harus menyediakan dan menyerahkan alokasi sumber daya dalam penyelenggeraan urusan bidang pendidikan di daerah perbatasan.

Fokus pembangunan pendidikan di Papua adalah melakukan percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Pemerintah juga akan melakukan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun serta percepatan peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pemerintah juga akan mempercepat peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik (http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/04/06/lj8hm9-infrastruktur-hambat-peningkatan-pendidikan-di-papua).

4.2.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Pengalokasian 20 persen Alokasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyediakan pendidikan murah bahkan gratis yang berkualitas di daerah. Sehingga dengan dengan demikian Pemerintah daerah dapat menyediakan tenaga pendidik yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan penyediaan biaya operasional pendidikan.sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa praktek sekolah gratis telah di laksanakan oleh pemerintah daerah perbatasan :

1. Pembangunan gedung-gedung sekolah di setiap daerah perbatasan seperti Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik maka selain gaji dan tunjangan, tenaga pendidik akan diberikan tambahan penghasilan

berdasarkan “tempat tugas” dengan empat kategori : 1) sangat terpencil sebesar Rp. 550.000; 2) Terpencil sebesar Rp. 500.000; 3) Jauh sebesar Rp. 450.000; dan 4) Dekat sebesar Rp. 400.000;

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dan program-program untuk pembangunan pendidikan di daerah perbatasan. Namun demikian, hal yang telah dilaksanakan dirasakan masih kurang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan tersebut.

Kenyataan tersebut ditunjukan dengan permasalahan antara lain belum terpenuhinya amanat 20 % anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah, rendahnya tingkat kelulusan UAN dan kurangnya tenaga pendidikan di daerah terpencil perbatasan.

Sehingga, pendidikan di daerah perbatasan harus lebih menjadi prioritas pembangunan manusia di daerah perbatasan. Selain itu perlu adanya pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang lebih jelas (http://www.australiaawardsindo.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=138&lang=en).

Permasalahan yang telah digambarkan tersebut diatas, maka pembiayaan, tenaga pendidik dan sarana prasarana menjadi faktor penting dalam membangun pendidikan daerah perbatasan. Alternatif fokus perbaikan pembagian tanggung jawab dalam efektifitas pembangunan pendidikan di daerah perbatasan sebagai berikut :

1. Anggaran

- Setiap tingkatan pemerintahan menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD sesuai amanat UUD’45.
- Pemerintah memberikan bantuan dana dekonsentrasi kepada daerah perbatasan untuk pendidikan dasar dan menengah.

2. Sumber Daya Manusia Pendidik

- Setiap tingkatan pemerintah merencanakan, mengangkat dan menempatkan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga pendidik daerah perbatasan.
- Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Sarana dan Prasarana

- Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar sarana dan prasarana.
- Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

4.3 *Australian Development Scholarships* (ADS) Sebagai Bentuk Kerjasama Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik di Provinsi Papua

Sebagai bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Pemerintah Australia melalui program AusAID kepada Pemerintah Indonesia dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding)* mengenai *Australian Development Scholarships* (ADS) di Jakarta, 9 Juli 1998. Beasiswa ini terbuka bagi sektor pemerintah dan swasta. Prioritas diberikan untuk :

a. Pertumbuhan berkelanjutan dan manajemen ekonomi
b. Investasi untuk pembangunan manusia
c. Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik
d. Keamanan dan perdamaian (http://adsindonesia.or.id/index.php).

Melalui kerjasama yang telah dijalin sejak lama, Indonesia dan Australia sudah menjadi tetangga yang baik. Untuk membantu Indonesia dalam pembangungan nasional melalui bidang pendidikan maka Australia mambantu dengan cara menawarkan beberapa bentuk beasiswa yang berada didalam *The Australian Awards*, salah satunya adalah *Australian Development Scholarships*.

ADS memberikan beasiswa kepada daerah - daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Papua. Dimana apabila dilihat dari tingkat IPM yang ada di Indonesia, Provinsi Papua ini adalah Provinsi yang paling rendah tingkat IPMnya. Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Adapun permasalahan khusus dalam pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas pengajar, rendahnya

kesejahteraan pengajar, rendahnya sarana fisik, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan.

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan penting untuk memindahkan orang keluar dari kemiskinan. Ini memberikan anak perempuan dan anak laki-laki keterampilan dan pengetahuan untuk hidup lebih penuh dan sehat, menemukan pekerjaan dan secara aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan membuka peluang dan akses ke sumber-sumber pendapatan lain yang sebelumnya tak terjangkau. Masyarakat terdidik juga lebih stabil dan lebih mampu bersaing. Pendidikan juga meningkatkan kesehatan, perempuan dan ibu yang berpendidikan cenderung memiliki anak lebih sedikit dan anak-anaknya lebih mungkin untuk bertahan hidup lima tahun pertama yang kritis.

Maka dari itu Pemerintah Australia mencoba membantu melalui program pembangunan untuk negara – negara berkembang yaitu *Australian Agency for International Development* dengan memberikan bantuan di segala bidang termasuk pendidikan. Dari pembangunan infrastruktur hingga pemberian beasiswa bagi masyarakat Papua, terutama tenaga pendidik.

Melalui 3 kategori penerima beasiswa ADS bisa mencakup ke seluruhan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Agar lebih banyak lagi kesempatan yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua dan kesempatan yang beasiswa yang diberikan ADS untuk Provinsi Papua dikhususkan untuk para pendidik ataupun pengajar.

Tabel 4.1 Data Penerima Beasiswa ADS *Public*
di Provinsi Papua tahun 2005 - 2009

NO.	KOTA / KABUPATEN	TAHUN	JUMLAH PENERIMA BEASISWA
1.	KOTA JAYAPURA	2005	3
		2006	2
		2007	4
		2008	1
		2009	1
2.	KABUPATEN MERAUKE	2005	2
		2006	1
		2007	-
		2008	-
		2009	-
3.	KABUPATEN MIMIKA	2005	2
		2006	1
		2007	1
		2008	1
		2009	1
4.	KABUPATEN JAYAWIJAYA	2005	2
		2006	1
		2007	-
		2008	-
		2009	-
JUMLAH PENERIMA BEASISWA			**23**

(sumber Hasil Data Penerima Beasiswa ADS)

Penerima kategori ADS *Public* ini adalah pegawai di departemen-departemen pemerintah, universitas negeri, serta BUMN, termasuk pegawai non-PNS. Lamaran harus terlebih dahulu disetujui oleh divisi pelatihan atau Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) yang terdapat pada tingkat daerah maupun nasional di dalam institusi pelamar sebelum diserahkan. Di Provinsi Papua kategori ADS *Public* ini lebih difokuskan kepada para tenaga pendidik atau pengajar dengan harapan setelah para tenaga pendidik atau pengajar ini selesai belajar untuk mendapatkan gelar *Masters* atau doktor maka mutu pendidikan dari

masing – masing tenaga pendidik atau pengajar dapat meningkat dan dapat menghasilkan murid – murid yang mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Bisa dilihat dalam tabel 4.1 ini, penerima beasiswa dari tahun 2005 sampai tahun 2009 berjumlah 23 orang dari 4 wilayah kabupaten yang ada di Papua.

Tabel 4.2 Data Penerima Beasiswa ADS *Open* di Provinsi Papua tahun 2005 – 2009

NO.	KOTA / KABUPATEN	TAHUN	JUMLAH PENERIMA BEASISWA
1.	KOTA JAYAPURA	2005	2
		2006	1
		2007	4
		2008	2
		2009	4
2.	KABUPATEN MERAUKE	2005	-
		2006	-
		2007	-
		2008	1
		2009	1
3.	KABUPATEN MIMIKA	2005	-
		2006	-
		2007	1
		2008	-
		2009	-
4.	KABUPATEN NABIRE	2005	1
		2006	1
		2007	-
		2008	-
		2009	-
5.	KABUPATEN JAYAWIJAYA	2005	1
		2006	-
		2007	-
		2008	-
		2009	1
JUMLAH PENERIMA BEASISWA			**20**

(sumber Hasil Data Penerima Beasiswa ADS)

Penerima kategori ADS *Open* ini adalah mereka yang bekerja di institusi swasta, termasuk institusi pendidikan swasta, yang dapat melamar secara bebas untuk beasiswa dari kategori ini. Selain terdapat beberapa kriteria seleksi dan persyaratan yang mungkin diberlakukan, pada sektor ini pelamar tidak memerlukan persetujuan dari pemerintah terlebih dahulu. Kategori ini juga member kesempatan bagi masing – masing individu untuk dapat menimba ilmu di Australia. Dapat dilihat di tabel 4.2 penerima kategori ADS ini dari tahun 2005 hingga tahun 2009 adalah sejumlah 20 orang. Diharapkan para penerima beasiswa ini dapat menggunakan ilmunya untuk membangun daerahnya.

Tabel 4.3 Data Penerima Beasiswa ADS *Targeted* di Provinsi Papua tahun 2005 – 2009

NO.	KOTA / KABUPATEN	TAHUN	JUMLAH PENERIMA BEASISWA
1.	KOTA JAYAPURA	2005	1
		2006	3
		2007	1
		2008	2
		2009	1
2.	KABUPATEN MERAUKE	2005	2
		2006	-
		2007	-
		2008	3
		2009	-
3.	KABUPATEN MIMIKA	2005	1
		2006	-
		2007	1
		2008	-
		2009	-
JUMLAH PENERIMA BEASISWA			**15**

Sumber : Hasil Data Penerima Beasiswa ADS

Penerima kategori ADS *Targeted* ini adalah mereka yang bekerja di lembaga-lembaga terkait dengan program-program AusAID atau kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan AusAID, termasuk organisasi pemerintah, BUMN, LSM, organisasi masyarakat (ormas), dan institusi perguruan tinggi milik pemerintah maupun swasta yang berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pelatihan bagi lembaga-lembaga tersebut.. Seperti yang dilihat di tabel 4.3, penerima beasiswa kategori *Targeted* ini dari tahun 2005 hingga 2009 berjumlah 15 dari 3 wilayah di Provinsi Papua.

Berdasarkan dengan data penerima beasiswa ADS di provinsi papua maka dapat di jelaskan bahwa jumlah penerima beasiswa kategori ADS *Open* tahun 2005 adalah 4 orang dan tahun 2009 meningkat menjadi 6 orang, karena beasiswa lebih difokuskan kepada para tenaga pendidik atau Pegawai Negeri Sipil. Jumlah penerima beasiswa ADS *Public* tahun 2005 adalah 9 orang dan pada tahun 2009 sejumlah 2 orang. Jumlah penerima beasiswa ADS *Target* tahun 2005 adalah 4 orang dan tahun 2009 sejumlah 1 orang.

Australian Development Scholarships (ADS) adalah penghargaan pembangunan jangka panjang yang dikelola oleh AusAID. ADS bertujuan untuk berkontribusi terhadap kebutuhan pembangunan jangka panjang negara-negara mitra Australia sesuai dengan perjanjian bilateral dan regional. Mereka menyediakan kesempatan bagi orang-orang dari negara-negara berkembang untuk melakukan studi penuh waktu sarjana atau pascasarjana di universitas-universitas Australia.

Kesempatan studi dan penelitian yang disediakan oleh ADS guna mengembangkan keterampilan dan pengetahuan individu untuk mendorong perubahan dan memberikan kontribusi pada hasil pembangunan negeri mereka

sendiri. ADS menawarkan periode minimum yang diperlukan bagi individu untuk menyelesaikan program akademik yang ditentukan oleh institusi pendidikan tinggi Australia, termasuk pelatihan persiapannya. Penerima beasiswa diminta untuk kembali ke negara mereka kewarganegaraan selama minimal dua tahun setelah menyelesaikan beasiswa mereka, untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara mereka. Apabila gagal untuk menyelesaikan maka dikenakan denda untuk Persemakmuran Australia sejumlah total biaya beasiswa.